

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Kebijakan Kepala Sekolah

1. Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah

Secara umum, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang datang dari pimpinan bukan dari suatu aturan yang ada, lantaran telah diberikan tanggung jawab dan hak kepada pimpinan untuk membuat suatu ketetapan meskipun berbeda dengan peraturan yang telah mestinya ada. Secara khusus, kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu *policy* yang memiliki makna mengurus segala masalah atau segala kepentingan umum yang terjadi atau bisa dikatakan sebagai administrasi pemerintah yang mengurus segala kepentingan masyarakat. Sehingga kebijakan jika dikaitkan dengan kepala sekolah, maka pengertian kebijakan kepala sekolah ialah segala keputusan yang datangnya dari kepala sekolah secara arif dan penuh bijaksana melalui kemampuan yang dimiliki kepala sekolah untuk melakukan pergerakan maksimal terhadap segala sumber daya yang ada di sekolah baik secara individu atau bersama-sama dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan untuk melangkah maju agar sekolah yang dipimpin menjadi sekolah maju bukan lagi berkembang.¹

Menurut Suwitri, kebijakan ialah beberapa tindakan yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang diusulkan baik oleh individu ataupun

¹ Al-Munawarah dan Fuady Anwar, Kebijakan Kepala sekolah Dalam Membina Akhlak Peserta Didik, *Tadzakka: Jurnal Pembelajaran Agama Islam*, 1/1 (2021), <https://doi.org/10.24036/00114798>, (diakses pada tanggal 19 Februari 2022), 02.

kelompok dalam lingkungan tertentu dengan cara juga menampilkan beberapa kesempatan yang dapat diperoleh dari usulan tersebut dan juga hambatan yang dimungkinkan terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Pada prakteknya, terdapat dua langkah dalam melaksanakan kebijakan yakni menerapkan kebijakan secara langsung dan menerapkan kebijakan melalui kebijakan turunan yang datangnya dari publik. Kebijakan yang terdapat di sekolah dibuat oleh seseorang yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam membuat kebijakan yaitu kepala sekolah ataupun dewan sekolah yang memang secara tetap diberi tugas dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan untuk mencapai tujuan sekolah.²

Oleh sebab itu, menjadi kepala sekolah hendaknya mampu menjadi pemimpin yang dapat membawa lembaga dan sumber daya lembaga bergerak dan mencapai tujuan yang telah diinginkan dan ditetapkan secara bersama. Selain itu, juga hendaknya dapat menerawang segala perubahan yang dimungkinkan dapat terjadi dimasa depan sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menjadikan lembaga tetap berdiri kokoh walaupun menghadapi era globalisasi. Kemudian tak hanya itu, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar atas segala keberhasilan pengaturan dan tata kelola sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan yang memiliki keahlian seni memimpin dengan baik guna mempengaruhi setiap bawahannya untuk maju bersama. Kepala

² Zaenab Hanim dkk, Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru, *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, 2/1 (2020), <https://doi.org/10.21831/jump.v2i1.30672>, (diakses pada tanggal 19 Februari 2022), 46.

sekolah yang dikatakan sukses dan berprestasi dalam memimpin ketika mampu mewujudkan segala harapan para bawahannya akan tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Sehingga bawahan kepala sekolah dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan puas, efektif, dan efisien.

Keberlangsungan organisasi sekolah secara pelaksanaannya tergantung dari cara memimpin kepala sekolah. Mulai dari pengelolaan, pembinaan, bahkan administrasi hendaknya berada dalam pantauan kepala sekolah yang baik. Sehingga kepala sekolah hendaknya memiliki beberapa kemampuan yang dapat memberikan ilmu dan pengalaman kepada bawahannya. Seperti kepala sekolah hendaknya memiliki kemampuan administrator yang baik guna untuk membuat rencana, mengorganisasikan, memberikan arahan kepada setiap bawahannya, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan yang ada di sekolah mulai dari pembelajaran hingga kegiatan seluruh staf dan karyawan.³

Selain harus memiliki keahlian administrator, juga hendaknya memiliki keahlian dibidang manajemen yang mana berguna untuk menciptakan pemberdayagunaan setiap sumber daya dengan tepat, yang berfungsi untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal dan mampu mencapai hasil yang besar sesuai dengan harapan kepala sekolah baik berkenaan dengan proses belajar mengajar atau hal lainnya yang berkaitan

³ Muhammad Afdal dan Sulvahrul Amin, Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 4 Kabupaten Bantaeng, *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, 9/1 (2021), <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.3382>, (diakses pada tanggal 19 Februari 2022), 116.

dengan kualitas dan kuantitas sekolah. Sekolah yang berhasil dan maju merupakan bentuk keberhasilan dan kemajuan kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab yang besar. Sehingga kepala sekolah hendaknya mampu memahami sekolah sebagai lembaga yang kompleks yang mesti dipimpin dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah kepemimpinan.

Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki identitas yang legal terhadap segala sesuatu yang terjadi atas sekolah yang dipimpinnya. Sehubungan dengan itu, kepala sekolah merupakan pimpinan yang tertinggi di suatu lembaga sekolah yang memiliki hak dan kuasa penuh. Oleh sebab itu, kepala sekolah hendaknya memiliki kecerdasan emosional yang tertata dengan baik sehingga dapat memberikan motivasi kepada bawahannya untuk mewujudkan sekolah yang sesuai dengan idaman kepala sekolah untuk tetap berdiri kokoh dan mampu bersaing dengan lembaga sekolah lainnya.⁴

Beberapa paparan mengenai kebijakan dan kepala sekolah tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan kepala sekolah ialah sebuah rangkaian peraturan berkenaan dengan sistem sekolah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita sekolah yang datangnya dari pimpinan lembaga sekolah yang kemudian diputuskan secara bersama dengan seluruh sumber daya sekolah agar memudahkan pimpinan membawa bawahannya ke arah tercapainya tujuan sekolah.

⁴ Muhammad Afdal dan Sulvahrul Amin, Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 4 Kabupaten Bantaeng, 117.

2. Tugas Kepala Sekolah dalam Membuat Kebijakan

Sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah dalam menentukan dan membuat suatu kebijakan setidaknya memahami terlebih dahulu segala kebutuhan yang dapat melangsungkan proses belajar mengajar tetap efektif dan efisien. Tugas kepala sekolah tidak hanya sebagai guru yang mendapatkan tugas tambahan memimpin lembaga, melainkan juga sebagai supervisi dan administrator yang mesti menjadi panutan bagi bawahannya. Oleh sebab itu, sebelum melakukan dan menciptakan kebijakan, tugas kepala sekolah pertama kali ialah menentukan tujuan dengan memperhatikan:

- a. Individu yakni setiap perorangan seluruh sumber daya manusia di sekolah baik yang berhubungan dengan kebutuhan, bakat, minat, serta hubungan setiap kinerja.
- b. Sekolah yakni lingkungan sekolah yang mesti diperhatikan suasana iklim, budaya dan tradisi untuk memberikan keseimbangan.
- c. Alur kerja yakni jalannya suatu sistem yang telah ditentukan mulai dari target, tata cara, materi, pelaksanaan dan lain sebagainya.
- d. Sistem politik kerja yakni memperhatikan segala yang berkaitan dengan kebijakan mulai dari administrasi, anggaran, penghargaan, dan lain sebagainya.⁵

Secara praktek, tugas kepala sekolah atas segala kebijakan di sekolah yakni sebagai pemimpin, manajer, supervisi, guru, motivator bagi

⁵ Muhammad Afdal dan Sulvahrul Amin, Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 4 Kabupaten Bantaeng, 117.

seluruh bawahannya agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Puncaknya ialah pada guru dan murid atau peserta didik yang melaksanakan seluruh pembelajaran serta seluruh kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Jika kinerja guru profesional dan sangat baik, maka kualitas peserta didik akan baik pula. Sehingga sebagai kepala sekolah yang mengawasi dan mendorong para guru untuk lebih baik terus terlaksana secara inten.

Kemampuan seorang guru harus dimaksimalkan untuk peserta didik mulai dari kemampuan mengajar, menguasai materi dan komponen lainnya dalam proses pembelajaran hendaknya dikuasai penuh oleh seorang guru. Meskipun demikian, guru memiliki ketergantungan terhadap kebijakan sekolah. Sedangkan kebijakan sekolah akan mempengaruhi iklim sekolah yang menjadikan guru tidak semangat. Kemudian kebijakan tersebut terhubung dengan keputusan seorang pemimpin sekolah. Tanpa adanya seorang pemimpin, kebijakan tidak akan berfungsi dengan manajemen yang telah ditentukan. Sehingga tugas kepala sekolah sebagai pengendali suatu kebijakan hendaknya dapat menciptakan kebijakan yang dapat mendukung iklim sekolah yang nantinya akan terhubung pada semangat kinerja para guru.⁶

Menurut Ekosiswoyo, mengatakan bahwa kepala sekolah merupakan seseorang dengan identitas kepemimpinan, dan kepemimpinan ialah kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruh positif terhadap orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian jika

⁶ Ibid., 117.

pendapat tersebut dikaitkan dengan tugas kepala sekolah sebagai pemimpin, maka kepala sekolah bertanggung jawab dalam kebijakan sekolah termasuk didalamnya dapat menggerakkan, memotivasi, dan memberikan kontrol terhadap kinerja guru dan bawahannya agar melaksanakan tugas dengan optimal, efektif, dan efisien. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam penentuan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. hal tersebut dikarenakan makna secara hakikat dari kepala sekolah merupakan seorang guru yang memiliki tugas tambahan sebagai pemimpin sekolah.

Sehubungan dengan tugas tambahan sebagai pemimpin, bukan lagi hanya sebagai guru yang fokus dalam proses pembelajaran, maka kepala sekolah bertugas dalam melakukan supervisi atas segala kebijakan sekolah. Dari hal tersebut, supervisi yang sesungguhnya dalam dunia pendidikan ialah kepala sekolah karena kepala sekolah lebih mengetahui atas segala kebijakan dan atas terlaksananya kebijakan sesuai keinginan atau tidak. Namun pada masa sekarang untuk supervisi sekolah itu terdapat tugas kepada yang lebih khusus mengawasi suatu sekolah. Sehingga terkadang supervisi dari luar kurang mendalami apa yang terjadi di sekolah meskipun nantinya terdapat solusi pembinaan. Namun, tujuan adanya supervisi khusus tersebut tidak lain hanya untuk melakukan kontrol agar bisa mengawasi dan mengendalikan jalannya pendidikan menuju tujuan yang ingin dicapai. Kepala sekolah yang juga berperan sebagai supervisi, harus menjadi jembatan komunikasi antara tenaga

kependidikan dengan bawahannya untuk memberikan pengawasan pribadi, menunjuk serta mendelegasikan suatu tugas kepada masing-masing bawahannya. Sehingga kepala sekolah harus menguasai keahlian pribadi, dasar, pengalaman, pengetahuan, serta pengawasan. Dengan demikian kepala sekolah akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang datang baik yang bersal dari sumber daya manusia ataupun berasan dari fasilitas sekolah.⁷

Penjelasan mengenai tugas tersebut secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa tugas kepala sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah itu hampir sama dengan tugas kepala sekolah secara umum. Hanya saja yang lebih diperhatikan ialah bagaimana kepala sekolah menjadi pemimpin yang bijak, berpengetahuan, dan memiliki jiwa motivaotr yang tinggi untuk menjadi penggerak bagi bawahannya. Sedangkan untuk membuat suatu kebijakan, kepala sekolah bertugas memahami secara khusus dan rinci segala kondisi tempat, iklim, sumber daya manusia, dan komponen sekolah lainnya agar kemungkinan tercapainya harapan menjadi kenyataan.

3. Tugas Kepala Sekolah dalam Membuat Kebijakan

Model kebijakan kepala sekolah merupakan suatu kebijkan yang diambil oleh kepala sekolah berdasar pada estimasi guna menjadikan pendidikan lebih maju melalui beberapa pertimbangan mengenai tujuan,

⁷ Zaenab Hanim dkk, Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru, 47-48.

strategi, dan kebutuhan lingkungan sekitar. Adapun beberapa model kebijakan kepala sekolah ialah:

- a. Model deskriptif yakni model kebijakan dengan cara mendapatkan kebijakan melalui peneitian ilmiah baik secara murni ataupun terapan untuk mengetahui berbagai gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat.
- b. Model normatif yakni model kebijakan dengan cara meningkatkan kapasitas kinerja secara optimal melalui suatu ide yang datang dari kepala sekolah yang kemudian diambil suatu keputusan secara bersama untuk menyelesaikan problema dalam kebijakan-kebijakan. Dengan model ini, kebijakan sekolah diambil dari pertimbangan yang sangat baik guna mengatasi masalah pendidikan yang dialami oleh masyarakat sekitar.
- c. Model verbal yakni model kebijakan dengan cara menformulasikan kebijakan melalui bahasa sehari-hari. Kepala sekolah yang menggunakan model verbal akan menciptakan kebijakan berdasarkan pada bahasa dan gaya yang sudah biasa dipakai sehari-hari tanpa harus begitu formal.
- d. Model sebagai pengganti dan perspektif. Model sebagai pengganti yakni model kebijakan dengan cara mensimulasikan beberapa masalah yang subtansi. Dalam model pengganti, masalah yang formal terjadi dianggap sebagai masalah yang sangat subtansi. Sedangkan model sebagai perspketif yakni model kebijakan dengan cara membuat

kebijakan secara ilmiah serta pengajuan norma, kaidah atau hukum yang dapat menyelesaikan masalah. Model sebagai perspektif biasanya disebut dengan model kebijakan yang menghasilkan analisis data. Oleh sebab itu, dalam suatu masalah hendaknya mampu diselesaikan melalui beberapa perspektif dan pengganti sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.⁸

Kemudian, langkah-langkah dalam membuat kebijakan kepala sekolah terdapat tiga tahapan secara umum. Sehingga kepala sekolah memiliki tugas untuk membuat rencana, melakukan rencana, dan mengevaluasi rencana. Tiga tahapan yang mesti dilakukan kepala sekolah dalam membuat kebijakan tersebut antara lain:

- a. Formulasi kebijakan yakni tahap awal dalam membuat kebijakan melalui perumusan kebijakan terlebih dahulu.
- b. Implementasi kebijakan yakni tahap kedua setelah membuat perumusan, kepala sekolah menerapkannya untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan merupakan beberapa rangkaian kegiatan yang telah diputuskan untuk memfasilitasi beberapa pernyataan kebijakan agar terealisasi dengan baik.
- c. Evaluasi kebijakan yakni tahap akhir untuk melihat dan mengetahui apakah yang telah diterapkan suatu kebijakan itu tercapai dengan baik

⁸ Sania Putriana dkk, Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5/1 (2021), (diakses pada tanggal 19 Februari 2022), 1278.

atau masih terdapat beberapa kekurangan yang mesti dicarikan sebuah solusi.⁹

Sedangkan menurut Yanto, dalam membuat suatu kebijakan secara umum terdapat beberapa langkah termasuk jika dilakukan oleh kepala sekolah dalam membuat kebijakan. Beberapa langkah tersebut antara lain:

- a. Perumusan masalah yakni dengan cara membuat beberapa rumusan yang dianggap sebagai masalah di suatu lembaga. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa asumsi, media, pandangan, dan pendapat tentang sekolah sehingga jika ditemukan suatu yang berlainan kemudian dapat diusulkan kebijakan yang baru.
- b. Peramalan yakni tahap pemberian pengetahuan terhadap suatu kebijakan yang memiliki keterhubungan dengan beberapa masalah yang dimungkinkan dapat terjadi ketika kebijaka dilaksanakan. Dalam melakukan tahap peramalan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ialah proyeksi merupakan mendasarkan ramalan masa yang akan datang pada kejadian yang cenderung terjadi dimasa lalu dan masa sekarang yang juga cenderung terjadi dimasa depan; prediksi merupakan mendasarkan ramalan pada beberapa perkiraan terhadap asumsi teoritis asertif; dan estimasi merupakan mendasarkan ramalan pada penilaian seorang ahli mengenai kondisi masyarakat dimasa yang akan datang.

⁹ Ibid., 1279.

- c. Rekomendasi yakni tahap merekomendasikan ide kebijakan untuk mencapai tujuan melalui penyampaian prasyarat dan penerapannya.
- d. Pemantauan yakni tahap menyelidiki kebijakan yang dibutuhkan berkenaan dengan sebab akibat terjadinya kebijakan publik.
- e. Evaluasi yakni tahap akhir proses mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diharapkan dengan hasil kebijakan yang telah dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model dalam membuat kebijakan kepala sekolah antara lain model deskriptif yakni model berdasar ilmiah, normatif yakni model berdasar kehidupan masyarakat, verbal yakni model berdasar bentuk keseharian kepala sekolah, pengganti dan perspektif yakni model dengan menguhungkan suatu masalah. Sedangkan langkah-langkah dalam membuat kebijakan kepala sekolah antara lain menformulasikan melalui merumuskan permasalahan, meramal kemungkinan yang dapat terjadi, dan merekomendasikan suatu ide kebijakan. Setelah itu, penerapan kebijakan yang disertakan dengan pemantauan secara intens. Hingga tahap akhir yakni melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan.

B. Kajian Tentang Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Begitu pentingnya moderasi beragama bagi generasi bangsa, akhirnya Kementerian Agama di Indonesia menyerukan moderasi

¹⁰ Sania Putriana dkk, Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 1277.

beragama melalui proses pendidikan di seluruh lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) Pengarusutamaan moderasi beragama serta menggerakkan pimpinan Ditjen Pendidikan Islam. Selain itu, juga diterbitkan buku-buku tentang moderasi beragama khusus untuk peserta didik dengan alasan memberikan penguatan berkenaan dengan pentingnya moderasi beragama yang juga mulai diviralkan di media sosial. Dengan demikian, kurikulum pendidikan juga menyamakan dengan yang diinginkan oleh Kementerian Agama sebagaimana hasil penelitian Siswanto, Yunus, maupun Ekawati yang menyatakan bahwa pemerintah memprogramkan kurikulum pendidikan hendaknya memuat tentang moderasi.¹¹

Sedangkan moderasi beragama itu terdiri dari dua kata yakni kata moderasi dan kata beragama. Makna moderasi dalam bahasa Arab itu berasal dari kata *al-wasathiyah* yang memiliki makna paling sempurna sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا

الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا

عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ

¹¹ Dina Mardiana dan Mochammad Taufiqi Rachman, Aktualisasi Moderasi Keberagamaan Di Lembaga Pendidikan Berciri Islam: (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia), *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 13/1 (2021), <http://dx.doi.org/10.26418/jvip.v13i1.42200>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2022), 26.

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”. (QS. Al-Baqarah: 143)

Berkenaan dengan ayat tersebut, *al-wasathiyah* juga didukung oleh salah satu hadits yang didalamnya mengandung makna ditengah-ditengah dan berarti bahwa paling baiknya suatu perkara ialah yang berada ditengah-tengah. Makna dari berada ditengah-tengah ialah bahwa dalam menghadapi suatu persoalan, Islam mengajarkan untuk menyelesaikannya secara kompromi dengan tidak memihak salah satu pendapat. Begitu pula dalam menghadapi suatu perbedaan agama atau suku dan lainnya tidak berada pada salah pihak, melainkan berada ditengah-tengah dengan cara saling menghargai dan bertoleransi terhadap segala perbedaan dan keyakinan masing-masing. Sehingga segala yang terjadi baik terdapat suatu persoalan atau tidak dapat disikapi dengan dingin tanpa adanya sikap yang anarki.

Kemudian Hashim Kamali mengutarakan pendapatnya berkenaan dengan moderasi bahwa tidak dapat terpisahkan dari kata kuncinya yakni keseimbangan dan keadilan. Oleh sebab itu, moderasi dalam bentuk sikapnya bukan berarti menerima dan mempercayai apa yang diyakini oleh ajaran yang lain melainkan bagaimana saling menghormati perbedaan ajaran lain tersebut. Pelaksanaan moderasi membutuhkan keseimbangan

dan keadilan agar terlaksana dengan efektif untuk menghindari sikap ekstrem pada salah satu pandangan. Maka dari itu, ekstrem dalam kata moderasi hendaknya sangat dijauhkan guna untuk menciptakan moderasi. Jika kata ekstrem tersebut masih berada dalam lingkup kehidupan sosial, maka yang ada sikap intoleran akan terus mengikuti jejak kehidupan terlbih-lebih jika disulut api politik.¹²

Dalam ajaran agama Islam, moderasi merupakan ajaran yang sangat inti, karena menyangkut hubungan segala keberagaman aspek sosial mulai dari keagamaan, budaya, adat istiadat, tradisi, suku, bahkan perbedaan bangsa dan negara. Keberagaman yang terjadi itu tidak bisa dihindarkan bahkan tidak dapat ditolak dalam tatanan kehidupan sosial. Hal itu disebabkan adanya dialektika antara suatu teks dengan kenyataan yang ada sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah tergantung pada pandangan akal dan wahyu masing-masing. Sehingga didalam Islam sendiripun perbedaan pendapat sering kali muncul akibat perbedaan akal yang menyebabkan terjadinya Islam fundamental, Islam liberal, Islam progresif, Islam moderat, dan lainnya.¹³

Kembali pada makna moderasi dalam bahasa lain selain bahasa Arab yakni dalam bahasa Latin berasal dari kata *moderatio* yang memiliki makna sebagai kesedangan yakni tidak lebih dan juga tidak kurang atau sering disebut dengan penguasaan diri. Sedangkan menurut TIM Kementerian Agama bahwa moderasi merupakan kemajemukan yang

¹² Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, *Jurnal Bimas Islam*, 12/2 (2019), <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2022), 328.

¹³Ibid., 329.

secara mutlak dibutuhkan terhadap kondisi Indonesia yang beragam melalui memberikan ajaran agama yang menyeluruh dan baik namun tetap berdasarkan pada sumber hukum Islam Al-Quran dan Hadits yang kemudian untuk mengambil suatu keputusan menggunakan akal dalam menyelesaikan masalah dengan baik.

Kemudian menurut Tarmizi Tohor menyatakan bahwa sikap moderasi beragama bukan lantas menjadikan diri sendiri meninggalkan agama, atau menjadi lemah terhadap agama yang dianutnya, atau bahkan menjadi lebih terbuka dan bebas akan agama lain, melainkan menjadikan diri sendiri bersikap menengah dan biasa saja terhadap segala perbedaan yang ada baik berkaitan dengan agama, kultur, dan lainnya. Perbedaan tersebut merupakan warisan nenek moyang yang mesti dihargai dan dihormati sebagai warisan budaya di Indonesia yang memang dari dahulu terkenal dan khas dengan keberagamannya. Menjadikan antara agama dengan budaya menjadi sejalan sebagaimana mestinya tanpa harus menyikapi secara anarki setiap perbedaan.¹⁴

Berdasarkan hal yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama ialah sikap menengah terhadap setiap perbedaan keyakinan agama baik didalam Islam itu sendiri atau dengan agama yang lainnya tanpa ada sikap ekstrem atau sikap intoleran pada setiap perbedaannya.

¹⁴ Samsul AR, Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama, *Jurnal Al-Irfan*, 3/1 (2020), <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v3i1.3715>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2022), 40-41.

2. Macam-Macam Moderasi Beragama Dalam Islam

Sikap moderasi merupakan sikap yang disunnahkan dalam Islam karena dianggap sebagai rahmat bagi manusia untuk bersikap menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Selain itu, sikap moderaasi dalam Islam mencerminkan sikap yang tidak mudah menyalahkan, menghakimi, atau mengkafirkan pandangan orang lain yang berbeda dengan agama Islam. Hal itu dikarenakan dalam Islam, sikap moderasi lebih bagaimana manusia memiliki sikap yang mengutamakan rasa persaudaraan yang tinggi dengan didasari pada rasa kemanusiaan bukan hanya pada rasa kebangsaan atupun rasa keimanan.¹⁵ Sehingga dalam Islam, moderasi beragama terbagi kedalam beberapa macam antara lain:

a. Moderasi Beragama dalam Akidah Islam

Dalam akidah Islam, sikap moderasi ini dikenalkan oleh salah satu aliran Islam yaitu aliran asy'ariyah yang mana bersikap menengahi terhadap aliran muktazilah yang identik dan kental dengan pola pikir rasionalnya dengan aliran salafiah dan hanabilah yang identik dengan pola pikir yang tekstual. Keduanya sama-sama ekstrem dalam menyikapi dan mempertahankan pendapatnya. Aliran muktazilah begitu ekstrem menganggap bahwa akal berada pada posisi diatas dari segala-galanya dengan cara mengambil suatu kesimpulan melalui beberapa premis yang sifatnya logistik. Sedangkan aliran salafiah dan hanabilah menganggap bahwa teks merupakan segala-galanya dalam

¹⁵ Agus Akhmadi, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity, *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13/2 (2019), (diakses pada tanggal 20 Februari 2022), 54.

mengatasi suatu persoalan hingga mengabaikan hal yang masuk akal. Sehingga sikap kedua aliran ini dianggap sebagai sikap yang jauh dari cerminan Islam bahwa Islam merupakan agama yang seimbang. Oleh sebab itu, aliran asy'ariyah berada ditengah-tengah antara kedua aliran tersebut bahwa akal dan teks sama-sama dibutuhkan dalam suatu persoalan.

b. Moderasi Beragama dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islampun, sikap moderasi harus diutamakan karena antara teks dan realitas yang ada sama-sama berjalan dalam menentukan suatu hukum. Hal itu dikarenakan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits tidak pernah bertolak belakang dengan urusan manusia yang maslahat. Suatu hukum yang baru berdasarkan pada hasil ijtihad para ulama, meskipun harus memperhatikan yang mutlak dalam Al-Quran dan Hadits juga harus memperhatikan fleksibilitas pada kenyataan kehidupan yang berbeda dari zaman ke zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan sosial kehidupan masyarakat berubah secara dinamis yang membutuhkan hukum baru yang lahir dari ijtihad ulama namun tetap berada dalam konteks kesesuaian dengan Al-Quran dan Hadits. Tidak bisa hanya terpaku pada sumber hukum Islam, karena turunnya hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits berbeda zaman dengan sekarang.

c. Moderasi Beragama dalam Penafsiran

Penafsiran yang dilakukan oleh penafsir hendaknya menghasilkan sesuatu yang bersifat moderasi dan penuh dengan rahmat. Maksudnya ialah hasil dari penafsiran tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam namun juga sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang sifatnya majemuk dan heterogen. Penafsiran tidak hanya untuk kepentingan sebagian kelompok saja, melainkan untuk seluruh masyarakat tanpa mementingkan kelompok, ras, suku dan lainnya untuk menciptakan kemaslahatan umat. Maksud dari umat disini bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan bagi seluruh manusia sesuai dengan tujuan datangnya Islam bukan untuk kemaslahatan bagi umat Islam saja melainkan untuk seluruh manusia.¹⁶

d. Moderasi Beragama dalam Pemikiran Islam

Moderasi beragama yang terdapat dalam pemikiran Islam yakni mengutamakan sikap toleransi dalam setiap perbedaan. Toleransi berarti terbuka akan setiap perbedaan yang ada. paling penting dalam pemikiran Islam ialah asas kemanusiaan baik dalam menjalin hubungan kerja, sosial, ekonomi dan lainnya tanpa mementingkan perbedaan yang ada. Meyakini apa yang diyakini dengan benar itu tidak harus dengan melecehkan keyakinan yang lain yang akhirnya akan tercipta suasana kehidupan yang damai dan tenteram dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan satu kesatuan.

¹⁶ Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, 331-334.

e. Moderasi Beragama dalam Tasawuf

Dalam konsep tasawuf, moderasi beragama untuk menghargai pemahaman orang lain. Sufistik yang identik dengan konsep sangat kental dengan ajaran Islam, bukan berarti tidak dapat memahami perbedaan paham orang lain. Melainkan sufistik hanya untuk menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidupnya.

f. Moderasi Beragama dalam Dakwah Islamiyah

Didalam Islam, dakwah Islamiyah berarti *amar ma'ruf dan nahi munkar* yakni menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Untuk melakukan dakwah di jalan Allah, hendaknya memperhatikan kondisi masyarakat sebagai sasaran dakwah baik dalam segi budaya, kebiasaan, tradisi dan lainnya agar apa yang didakwakan tersampaikan dengan tepat dan cepat. Pendakwah tidak bisa bersikap egois bahwa yang paling benar adalah menurut dirinya melainkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai bentuk sikap moderasi beragama dalam dakwah Islam.¹⁷

Dari penjelesan macam-macam moderasi beragama tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa macam-macam moderasi beragama dalam Islam itu terdapat dalam beberapa aspek yaitu didalam akidah Islam, hukum Islam, penafsiran, tasawuf, pemikiran Islam, dan dakwah Islam yang mana dalam keenam macam tersebut bentuk moderasi didalamnya harus ditanamkan guna menciptakan kehidupan yang damai.

¹⁷ Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, 335-340.

3. Moderasi Beragama di Sekolah

Dalam tatanan sekolah, konsep moderasi beragama menjadi target yang mesti diselenggarakan oleh lembaga sekolah. Penyelenggaraan tersebut hendaknya melalui beberapa dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah yang berada pada tingkatan paling atas dan paling memiliki keadilan terhadap pelaksanaan pendidikan. Ketetapan yang dibuat pemerintah akan turun kepada masing-masing pimpinan lembaga sekolah yang kemudian diturunkan kepada para guru yang selanjutnya diturunkan dan diajarkan kepada peserta didik. Sehingga penanaman moderasi beragama di sekolah sangat tergantung pada kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah sebagai pengendali lembaga dan guru sebagai orang yang berinteraksi secara intens dengan peserta didik. Sehingga ketercapaian moderasi beragama tergantung dari keduanya.

Kepala sekolah yang menentukan suatu kebijakan melalui sistem demokratis merupakan salah satu contoh teladan bagi peserta didik bahwa sistem moderasi telah diterapkan oleh kepala sekolah. Begitu pula dengan guru yang tidak mudah mencekam kesalahan aturan agama, melainkan dengan pemberian pendekatan yang halus juga menggambarkan moderasi beragama bagi peserta didik. Pada tingkatan pendidikan yang ada, penanaman moderasi beragama paling dianggap efektif jika ditanamkan dan diajarkan pada peserta didik tingkat sekolah dasar, karena peserta didik baru mengenal suatu pembelajaran ketika di bangku sekolah dasar, sehingga kecepatan menerima materi lebih cepat tanpa ada pengetahuan

yang lainnya. Tugas dari peserta didik nantinya hanya pada menyesuaikan dengan kehidupan yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya. Berbeda dengan tingkatan selanjutnya, peserta didik akan menerima pengetahuan yang lebih luas sehingga kecepatan menangkap materi moderasi beragama akan sedikit terhambat.¹⁸

Penerapan moderasi beragama di tatanan sekolah bkan berbentuk fatwa atau dalil melainkan dalam bentuk pengajaran sikap atau perilaku yang baik dan tidak baik berkenaan dengan moderasi beragama. Misalnya, dalam bentuk kegiatan keagamaan. Jika di sekolah tersebut terdapat peserta didik yang berbeda agama sedang melangsungkan acara keagamaan, maka peserta didik yang lain dianjurkan untuk ikut serta sebagai bentuk moderasi beragama di sekolah. Anjuran tersebut merupakan pengajaran bagi guru atau kepala sekolah terhadap peserta didik, namun perilaku ikut serta dalam kegiatan keagamaan merupakan bentuk sikap moderasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan suasana sekolah yang penuh dengan kedaiaman.

Dengan adanya sistem yang seperti itu, lambat laun kebiasaan anak akan berubah dengan sendirinya, yang biasanya memiliki sifat risih terhadap perbedaan disekitar, tapi akan memiliki sifat kebersamaan yang kuat walaupun terdapat perbedaan. Sikap peserta didik akan dibawa kedalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga peserta didik bersikap sewajarnya saja dalam urusan agama. Cukup melaksanakan apa yang

¹⁸ M. Kholis Amrullah dan M. Irfan Islamy, Moderasi Beragama: Penanaman Pada Lembaga Pendidikan Formal Dan Nonformal, *Jurnal Nizham*, 9/2 (2021), <https://doi.org/10.32332/nizham.v9i02.4308>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2022), 60.

diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang tanpa harus memperdebatkan perbedaan hukum dan agama dengan orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan pertengkaran. Kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan di sekolah itu dapat dibentuk dalam beberapa cara mulai dari pengajaran, kegiatan sekolah, peraturan dan lainnya sesuai dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan di sekolah mengenai moderasi beragama.¹⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa moderasi beragama dalam sekolah sangatlah penting untuk mewujudkan generasi bangsa yang baik. Berawal dari sikap yang diajarkan dan dibiasakan di sekolah dalam bentuk apapun, akan dibawa peserta didik kedalam tatanan kehidupan sosial lingkungan rumahnya. Oleh sebab itu, kegiatan ataupun pengajaran di sekolah hendaknya disertakan penanaman moderasi beragama. Contoh dari penerapan moderasi beragama di sekolah salah satunya yaitu adanya karyawan atau guru dan siswa yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda misalnya ada yang beragama kristen, budha, Islam dan lainnya yang menyatu atau berbaur dalam satu lingkungan sekolah untuk menempuh pendidikan dan mewujudkan cita-cita pendidikan.

¹⁹ M. Kholis Amrullah dan M. Irfan Islamy, *Moderasi Beragama: Penanaman Pada Lembaga Pendidikan Formal Dan Nonformal*, 61.